

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Oleh

GABRIELLA OCHA INDAH KESUMA

Dalam setiap peradilan tindak pidana, tidak jarang kita menemukan Dokter Forensik sebagai ahli terutama dalam kasus kematian tidak wajar. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus agar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Banyak masyarakat yang belum paham terkait peran ahli dalam persidangan. Selain kasus pembunuhan, kasus percobaan pembunuhan adalah salah satu kasus yang menggunakan ahli seperti pada putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met. Maka, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana peran ahli dalam persidangan kasus percobaan pembunuhan? *Kedua*, Bagaimana keabsahan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan dampaknya apabila terdapat kesalahan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ahli dalam persidangan dan keabsahan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang terjadi dan mewawancarai langsung narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli diteliti secara cermat karena sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dimana keterangan ahli menempati urutan kedua setelah keterangan. Selain dalam KUHP, persoalan pengambilan keterangan ahli juga diatur dalam KUHP. Dalam hal ini KUHP mengatur sanksi pidana bagi ahli yang menolak memberikan keterangan dalam penyidikan perkara pidana. Dalam KUHP, keterangan ahli merupakan alat pembuktian untuk memperoleh kebenaran materil. Seperti yang dikatakan Andi Hamzah, yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak, karena dengan demikian hak asasi manusia menjadi taruhannya. Untuk itu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang diperoleh melalui alat bukti. Dalam hal validitas data yang dihasilkan oleh dokter, dokter dianggap benar-benar melakukan praktik kedokteran, dibandingkan dengan profesi medis. Profesi medis adalah struktur sosial dan profesional yang terdiri dari sekelompok orang yang dididik secara formal dan diberi wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran.

Gabriella Ocha Indah Kesuma

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang dokter terikat dengan sumpah jabatannya, dan wajib menulis *Visum et Repertum* sesuai fakta yang ada. Maka meskipun di suatu daerah tersebut tidak ada dokter forensik, penyidik dapat meminta dokter manapun untuk memberikan keterangan. Dan apabila seorang dokter melakukan kesalahan dengan sengaja, maka akan dikenakan sanksi pidana, perdata ataupun sanksi administrasi.

Kata kunci : *Visum et Repertum*, keterangan ahli, percobaan pembunuhan.

ABSTRACT

EXPERT RESPONSIBILITY IN PROVIDING INFORMATION IN ATTEMPTED MURDER CASES

By

GABRIELLA OCHA INDAH KESUMA

In every criminal trial, it is not uncommon to find Forensic Doctors as experts, especially in cases of unnatural death. Forensics is a way to prove or uncover cases in order to get the real truth. Many people do not understand the role of experts in trials. Apart from murder cases, attempted murder cases are one of the cases that use experts as in decision Number 93/Pid.B/2022/PN Met. So, the problem formulation in this research is: First, what is the role of experts in trials of attempted murder cases? Second, what is the validity of the Visum et Repertum issued and the impact if there is an error? This research aims to determine the role of experts in trials and the validity of the information given by these experts. The method used in this research is empirical juridical, where the author goes directly to the field to see the facts that occurred and directly interview the sources.

The research results show that expert statements are carefully scrutinized because they are in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, where expert statements are in second place after statements. Apart from the Criminal Procedure Code, the issue of taking expert information is also regulated in the Criminal Procedure Code. In this case, the Criminal Code regulates criminal sanctions for experts who refuse to provide information in the investigation of criminal cases. In the Criminal Procedure Code, expert testimony is a means of proof to obtain material truth. As Andi Hamzah said, the most important thing in criminal procedural law is to prove whether the defendant actually committed the alleged act or not, because then human rights are at stake. For this reason, criminal procedural law aims to find material truth obtained through evidence. In terms of the validity of data produced by doctors, doctors are considered to actually practice medicine, as opposed to the medical profession. The medical profession is a social and professional structure consisting of a group of people who are formally educated and authorized to apply medical knowledge.

Gabriella Ocha Indah Kesuma

It can be concluded that a doctor is bound by his oath of office, and is obliged to write a Visum et Repertum according to the existing facts. So even if there is no forensic doctor in an area, investigators can ask any doctor to provide information. And if a doctor makes a mistake intentionally, he will be subject to criminal, civil or administrative sanctions

Key words: Visum et Repertum, expert testimony, attempted murder.